

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Hak Narapidana Wanita Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum optimal pemberian haknya, yaitu :

- a. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu pemberian makanan tambahan di lembaga pemasyarakatan yang masih berupa kuantitas belum kualitas yang diperlukan narapidana wanita menyusui.
- b. Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu lembaga pemasyarakatan baru memberikan waktu untuk narapidana wanita menyusui, namun belum memberikan fasilitas khusus atau tempat atau sel khusus bagi narapidana wanita untuk menyusui bayinya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, pemberian hak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan telah

memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana wanita menyusui dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, diberikan saran :

1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan seharusnya direvisi untuk mengatur secara lebih jelas mengenai jenis-jenis makanan tambahan yang dibutuhkan oleh narapidana wanita menyusui.
2. Bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan fasilitas tempat bagi narapidana wanita menyusui, dan tempat bayi untuk tidur di sel berbeda dengan narapidana-narapidana lain, agar kesehatan dan perkembangan ibu dan bayi terjamin, tanpa adanya resiko tertular oleh penyakit narapidana-narapidana di satu sel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adik Wibowo & Tim, 2015, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- August Burns A., dkk, 2000, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, ANDI, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harum Pudjiarto. St. RS, 1999, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Komunitas Ibu-Ibu Seruu, 2016, *Menyusui Itu Seru!! 34 Kisah Nyata Pengalaman Menyusui + 1 Bonus Tes*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- LBH APIK dan Forum, 1996, *Perisai Perempuan : Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, Bogor.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. B., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Qorry 'Aina Abata, 2015, *Merawat Bayi Baru Lahir (Cetakan 1)*, Yayasan PP Al-Furqon, Madiun.

Soegondo. R., 2007, *Fasilitas Sarana Dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan (Cetakan Pertama)*, Insania Citra Press, Yogyakarta.

Suryadi Radjab, dkk. 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (Cetakan Pertama)*, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wiyono. R., 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291.

Website:

<http://www.kinerja.or.id/pdf/5dffecb9-4ca6-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf>,

diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.25 WIB.

<http://www.kinerja.or.id/pdf/5dffecb9-4ca6-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf>,

diakses pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 14.40 WIB.

Munawir Azis, 2010, Melindungi Tahanan Perempuan, Suara Merdeka.com, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.50 WIB.

<http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 15.51 WIB.

http://pih.kemlu.go.id/files/UU_1984_7.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 12.39 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/dari-pendjara-djogjakarta-1910-hingga-lapas-wirogunan-2015/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2016, pukul 20.15 WIB.

<http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 23.30 WIB.

<http://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 23.40 WIB.

<https://infolaboratoriumkesehatan.wordpress.com/tag/kebutuhan-nutrient-ibu-menyusui/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016, pukul 0.45 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bd6dab5117a4/amnesti,-rehabilitasi,-abolisi,-dan-grasi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016, pukul 16.25 WIB.

<http://kbbi.web.id/amnesti>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016, pukul 16.54 WIB.